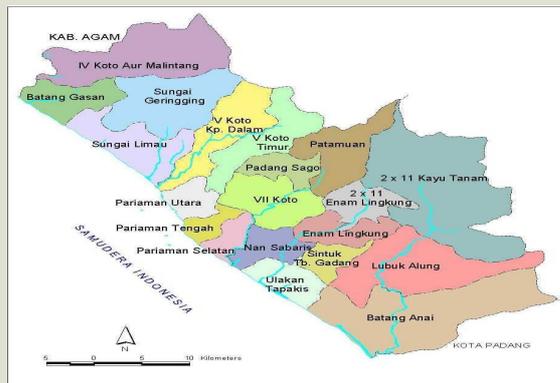




# LAKIP 2022

# KESBANGPOL



**PEMERINTAH KABUPATEN**  
**PADANG PARIAMAN**  
**TAHUN 2023**

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .....	2
1.2 Permasalahan Utama .....	6
1.3 Sistematika Pelaporan .....	12
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Rencana Strategis .....	14
2.1.1. Visi .....	14
2.1.2. Misi .....	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran .....	15
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja .....	18
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>19</b>
3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik .....	19
3.2 Realisasi Anggaran .....	40
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Langkah Kedepan .....	43

**LAMPIRAN**

---

## BAB I

### PENDAHULUAN

---

**P**emerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi Bupati yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

---

## **A. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mulai 1 Januari 2012 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol dan Linnmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh kepala kantor dan beralamat di Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas :

**MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

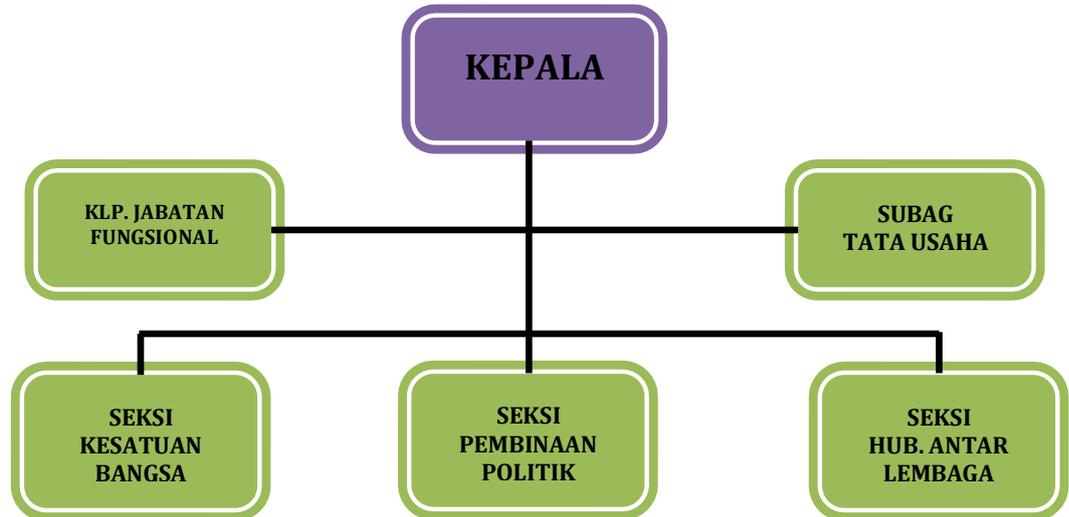
Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

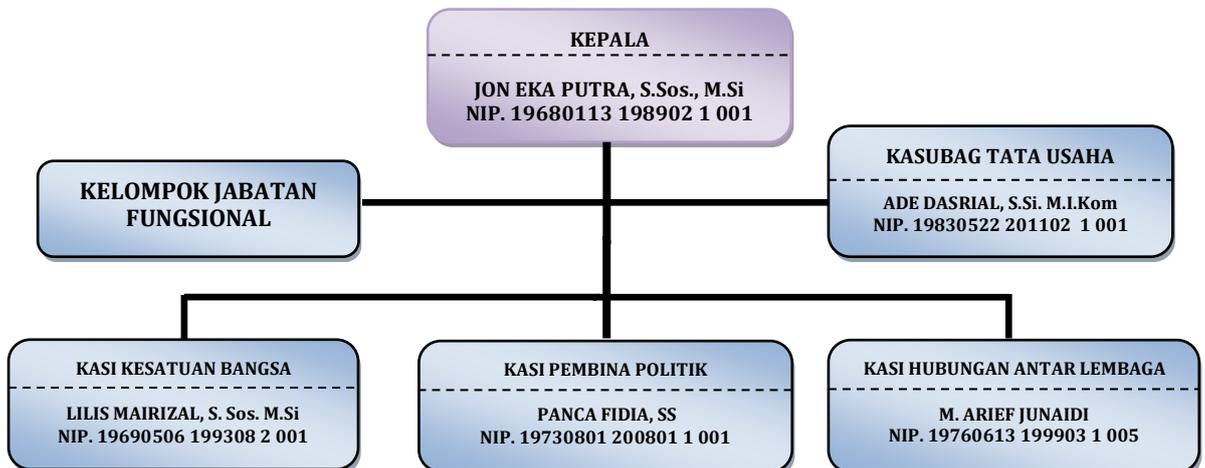
## A.1 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar : 1

### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



### PEJABAT STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



---

## **A.2 URAIAN TUGAS DAN DASAR HUKUMNYA**

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2012, Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

### **A. KEPALA KANTOR**

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.

6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

### **A.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI**

Pejabat dan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pegawai Struktural dan Fungsional yang berjumlah sebanyak 8 (delapan) orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu oleh 10 (sepuluh) orang Tenaga Swakelola, dengan rincian nama sebagai berikut :

**Tabel. 1**  
**DAFTAR PEGAWAI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDD K
1	JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si	19680113 198902 1 001	IV/b	III/a	Kepala Kantor	S.2
2	ADE DASRIAL, S.Si. M.I.Kom	19830522 201102 1 001	III/c	IV/a	Kasubag Tata Usaha	S.2
3	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	19690506 199308 2 001	IV/a	IV/a	Kasi Kesatuan Bangsa	S.2
4	PANCA FIDIA, SS	19730801 200801 1 001	III/d	IV/a	Kasi Pembinaan Politik	S.1
5	M. ARIEF JUNAI, SKM	19760613 199903 1 005	III/c	IV/a	Kasi Hubungan Antar Lembaga	S.1
6	DEDDY YUSWAR, SKM	19750326 199602 1 001	III/d	-	Staf	S.1

7	ANDRE ASHARI, S.IP	19861108 201406 2 002	III/a	-	Staf	S.1
8	SRI WAHYUNI, A.Md	19900526 201503 2 002	II/d	-	Staf	D.III
9	ENNY NOVRIITA DEWI, SE	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
10	ERFINA YENTI	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
11	YOLA SISKA NANDA,	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
12	SANTA SAPUTRA RAMAYANSAH	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
13	METRALIADI, S.Ak	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
14	TRI MURTI, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
15	NICO PRATAMA PUTRA, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
16	SYELFI SULPIKA RAHMI, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
17	DWIDAYANTI PUTRI, SE	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
18	MURNI	-	-	-	Tenaga Swakelola (Kebersihan)	SMA

## B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

### Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

Identifikasi permasalahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

#### 1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

#### 2) Hambatan Eksternal

1. Aspek kelembagaan :

- 
1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman belum terukur secara jelas.
  2. Karena tugas dan fungsi lembaga kesatuan bangsa dan politik tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi kepala daerah sehingga kesulitan dalam penganggaran karena tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.
  3. Belum maksimalnya tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Aspek politik :
    - Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
    - Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
    - Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
    - Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
  3. Aspek Sosial
    1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
    2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan

- 
3. Kurangnya program pembinaan karakter bangsa
  4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
  5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya
4. Aspek Ekonomi :
1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
  2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
  3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
  4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
  5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
  6. Masih kurangnya sinergitas antara aparat dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :
1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
  2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.

- 
3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
  4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
  5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundang-an, perbup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas Pembinaan Wasbang</li> <li>2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang</li> <li>3. Kompetensi narasumber</li> <li>4. Koordinasi antar instansi terkait</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurang pemisah antara Masyarakat mampu &amp; tak mampu</li> <li>2. Munculnya sifat individualis dalam Masyarakat</li> <li>3. Kehidupan yg makin berat &amp; kompleks</li> <li>4. Tingkat pendidikan masyarakat</li> </ol>	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara Pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundang-an, perbup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensitas Pembinaan pada masyarakat dan Parpol</li> <li>2. Sosialisasi Peraturan perundangan pada masyarakat &amp; anggota parpol</li> <li>3. Fasilitasi pada partai politik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik</li> <li>2. Sikap apatis Masyarakat</li> <li>3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Hak politiknya</li> </ol>	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan Bangsa	Sedang	Peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar instan-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemajuan teknologi in-</li> </ol>	Masih kurangnya pembinaan keta-

dan bela Negara Masyarakat		an, Perbup	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Intensitas Pembinaan bela negara</li> <li>3. Cakupan peserta pembinaan bela Negara</li> <li>4. Kompetensi narasumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>formasi su- Dah sampai ke daerah</li> <li>2. Efek globalisasi yang sulit dibendung</li> <li>3. Tingkat pemahaman Masyarakat</li> <li>4. Munculnya berbagai ormas / LSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hanan nasional &amp; bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan &amp; organisasi lembaga swadaya masyarakat</li> </ul>
Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba dan miras		Peraturan Perundangan, Perbup	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi antar instansi terkait</li> <li>2. intensitas penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan</li> <li>3. Cakupan peserta penyuluhan bahaya narkoba</li> <li>4. Kompetensi Narasumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba</li> <li>2. sikap apatis masyarakat terhadap peredaran narkoba</li> <li>3. kemajuan teknologi sehingga timbulnya modus baru dalam peredaran narkoba</li> <li>4. efek globalisasi yang sulit dibendung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat</li> </ul>

Permasalahan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

- 
4. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Mengadakan Pembinaan, Penyuluhan dan sosialisasi serta kampanye kepada elemen masyarakat tentang bahaya narkoba

### **C. SISTEMATIKA PELAPORAN**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menginformasikan Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

#### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

---

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik**

Menyajikan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

### **B. Realisasi Anggaran**

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

---

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran :**

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

---

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

**K**antor Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2021-2026 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2022. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022. Target-target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

---

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2022

Tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan demokratis	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif  Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat  Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif  Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Jumlah kasus Narkoba	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	Jumlah kasus Narkoba

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
penyalahgunaan narkoba				
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 termasuk untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh 4 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>		
1.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	60%
2.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 partai politik
3.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%
4.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	30 kasus
5.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

**K**antor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2022, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/keompok masyarakat	Persentase ormas/keompok yang terdaftar dan aktif	%	60%	60%	100%	Berhasil
2.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola	Persentase Laporan pertanggungj	Partai Politik	10 parpol	10 parpol	100%	Berhasil

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
	keuangan dan administrasi	awaban Parpol tepat waktu					
3.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100%	100%	100%	Behasil
4.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Persentase pelaksanaan pembinaan penanganan kasus narkoba.	%	100 %	100%	62,6%	Kurang Berhasil
5.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100%	100%	100%	Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 :

	<p><b>Sasaran 1:</b></p> <p><b><i>Meningkatnya Pembinaan Ormas/LSM/Kelompok masyarakat</i></b></p>
---	--

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2022		
	Target	Realisasi	%
Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	60%	60%	100%

Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif tahun ini adalah 60% jumlah ormas/lsm yang aktif dan terdaftar dari Jumlah ormas/lsm yang terdata, realisasi dari indikator tersebut adalah sama 60% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan 60% target dan terealisasi 60% dengan capaian 100%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan karena kegiatan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSEN TASE
<b>I</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>16.517.750</b>	<b>16.197.500</b>	<b>320.250</b>	<b>98.06%</b>
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan di Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>				
1.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	16.517.750	16.197.500	320.250	98.06%

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah**

Anggaran **Rp16.517.750,00** dan realisasi **Rp16.197.500,00** atau sebesar **98,06%** dengan sisa dana sebesar **Rp320.250,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terdatanya, terpantaunya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pendataan dan pemantauan terhadap ormas dan LSM.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja terhadap sasaran 1 adalah dengan cara menginventarisir ormas/ LSM ke lapangan dan untuk anggaran direncanakan ada pada tahun 2024.

	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi
---	---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2022		
	Target	Realisasi	%

Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 parpol	10 parpol	100%
--	-----------	-----------	------

Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu 

Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu tahun ini adalah 10 (sepuluh) Partai Politik yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dibandingkan dari 10 (Sepuluh) Partai Politik yang menerima bantuan APBD setiap tahun, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan 10 (spuluh) partai politik target dan terealisasi 10 (sepuluh) partai politik dengan capaian 100%.

Adapun penyebab tercapainya 100% kinerja tersebut adalah karena pihak Kesbangpol secara rutin melakukan pembinaan administrasi keuangan partai. Selain itu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan workshop/Bimtek Keuangan terhadap bendahara parpol dan anggaran untuk kegiatan tersebut dianggarkan pada tahun 2024.

Berikut partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Tahun 2022 :

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	Jumlah Suara	Jumlah Bulan	Nilai Persuara (Rp)	JUMLAH BANTUAN DANA PARTAI POLITIK (Rp)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	15.313	12 bulan	5.000,00	76.565.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	32.871	12 bulan	5.000,00	164.355.000,00
3	Partai Golongan Karya	4	18.164	12 bulan	5.000,00	90.820.000,00
4	Partai Nasional Demokrat	3	14.183	12 bulan	5.000,00	70.915.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	4	24.331	12 bulan	5.000,00	121.655.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	4	19.117	12 bulan	5.000,00	95.585.000,00
7	Partai Amanat Nasional	7	31.602	12 bulan	5.000,00	158.010.000,00
8	Partai Demokrat	4	19.166	12 bulan	5.000,00	95.830.000,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	8.688	12 bulan	5.000,00	43.440.000,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	7,867	12 bulan	5.000,00	39.335.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>191.302</b>			<b>956.510.000</b>

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>1.028.350.000</b>	<b>1.027.645.700</b>	<b>704,300</b>	<b>99,93</b>
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.</i>				
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	1.028.350.000	1.027.645.700	704,300	99,93

---

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.**

Anggaran **Rp1.028.350.000,00** dan realisasi **Rp1.027.645.700,00** atau sebesar **99.93%** dengan sisa dana sebesar **Rp704,300,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya Verifikasi terhadap Bantuan Dana Hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.



**Sasaran 3:**

Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2022		
	Target	Realisasi	%
Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%

Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah tahun ini adalah 100% target yang didapat Jumlah Konflik yang terjadi dibandingkan dengan potensi konflik yang ada. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh kerjasama tim penagangan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang-undang serta faktor lainnya yaitu karakteristik masyarakat Padang Pariaman yang homogen dan berbudaya serta mengedepankan musyawarah mufakat terlebih dahulu dalam penyelesaian suatu masalah sehingga potensi konflik yang terdeteksi sejak dini dapat dicegah.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERS ENTA SE
II	<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>165.626.450</i>	<i>145.047.500</i>	<i>20.578.950</i>	<i>87.68</i>

	<i>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i>				
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik di Daerah	34.157.500	33.247.500	910.000	97.34
2.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota	131.468.950	111.800.000	19.668.950	85.04

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik di Daerah**

Anggaran **Rp34.157.500,00** dan realisasi **Rp33.247.500,00** atau sebesar **97,34%** dengan sisa dana sebesar **Rp910.000,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terpantau, tertangani dan tersedianya Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya Dokumen Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman per triwulan.

**2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota**

Anggaran **Rp131.468.950,00** dan realisasi **Rp111.800.000,00** atau sebesar **85,04%** dengan sisa dana sebesar **Rp19.668.950,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terjalinnya koordinasi rutin antar forkopimda untuk membahas isu-isu strategis serta mencari

jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat.

	<b>Sasaran 4:</b> Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat
---	---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

2. Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2022		
	Target	Realisasi	%
Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	30 Kasus	48 Kasus	62,5%

Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	
--	---

Untuk target pada Indikator Kinerja Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat tahun ini adalah 30 kasus target. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 48 kasus dengan capaian kinerja 62,5%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh kerjasama Badan Narkotika Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan penyuluhan kepada generasi muda dan mengkampanyekan bahaya anti narkoba setiap tahun melalui kegiatan Peringatan Hari Anti

Narkotika Internasional setiap tahun yang dilaksanakan oleh BNK dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari siswa SD, SMP dan SMA, Tokoh masyarakat serta aparatur daerah serta kegiatan razia dilakukan ke sekolah-sekolah dalam rangka pemberantasan narkoba di masyarakat.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
<b>V</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	-	<b>100</b>
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	5,000,000	5,000,000	-	100

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**

Anggaran **Rp5,000,000,00** dan realisasi **Rp5,000,000,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp00,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman.

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja terhadap sasaran ini adalah dengan cara lebih sering melakukan penyuluhan narkoba dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

	<p><b>Sasaran 5:</b> Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.</p>
---	--

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2019. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

3. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2022		
	Target	Realisasi	%
Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%

Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam


Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam akibat dengan upaya merusak tatanan kehidupan berbangsa tahun ini adalah 100% target yang didapat Jumlah Gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan potensi gangguan keamanan akibat. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh selain kerjasama tim lintas sektoral yang tergabung dalam komunitas intelijen daerah dan tim penagangan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang juga dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat dan pembentukan forum pembauaran kebangsaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang beranggotakan dari unsur tokoh masyarakat antar etnis, suku dan budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
<b>II</b>	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>49.606.000</b>	<b>394,000</b>	<b>100.00</b>
1.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	50,000,000	47,820,200	394.000	100.00

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

**a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan**

Anggaran **Rp50.000.000,00** dan realisasi **Rp49.606.000,00** atau sebesar **99,21%** Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman tentang nilai – nilai luhur bangsa.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>						
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	69,41%	-	-	-	
2.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/keompok masyarakat	Persentase ormas/keompok yang terdaftar dan aktif	60%	60%	60%	100%	
3.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	
4.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	
5.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	30 Kasus	30 kasus	-	-	
6.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
	ketahanan bangsa.						

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH					REALISASI JANGKA MENENGAH					% REALISASI DI TAHUN INI (2021)/TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH (2021)	INTERPRETASI	
				2018	2019	2021	2021	2022	2016	2017	2018	2019	2020			2021
1	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%		75%	75%						69,5%	52,06%	-	-	
2	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	%	60%	60%	60%	60%		58%	58%	58%	60%	60%	60%	60%	
3	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol	Partai Politik	11 Partai Politik	11 Partai Politik	10 parpol	10 parpol		9 Partai Politik	9 Partai Politik	9 Partai Politik	9 parpol	8 parpol	8 Parpol	8 parpol	

	keuangan dan administrasi	tepat waktu														
4	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	Kasus	54 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	54 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	30 Kasus	69 Kasus	-	-	
6	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	

## 3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022.

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	705,525,554	692,971,496	12,554,058	98.22	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	649,575,554	640,081,496	9,494,058	98.54	Tersedianya Gaji dan Tunjangan
	b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55,950,000	52,890,000	3,060,000	94.53	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
2	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	54,150,000	53,242,800	907,200	98.32	
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21,040,000	20,403,550	636,450	96.98	Tersedianya Renja dan Renstra selama 12 bulan
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,440,000	8,389,500	50,500	99.40	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD selama 12 bulan
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,010,000	9,881,250	128,750	98.71	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD selama 12 bulan
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,000,000	1,000,000	-	100	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD selama 12 bulan
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,000,000	998,000	2,000	99.80	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,660,000	12,570,500	89,500	99.29	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semesteran pada OPD selama 12 bulan
3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	12,030,000	11,936,375	93,625	99.22	
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10,930,000	10,836,375	93,625	99.14	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan handal
	b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,100,000	1,100,000	-	100.00	
4	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	78,890,000	77,545,050	1,344,950	98.30	
	a. Fasilitas Kunjungan Tamu	15,000,000	13,745,050	1,254,950	91.63	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum tamu selama 12 bulan
	b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	63,890,000	63,800,000	90,000	99.86	Terlaksananya rapat Koordinasi selama 12 bulan
<b>JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02</b>		<b>850,595,554</b>	<b>835,695,721</b>	<b>14,899,833</b>	<b>98.25</b>	

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	<b>JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01</b>	<b>850,595,554</b>	<b>835,695,721</b>	<b>14,899,833</b>	<b>98.25</b>	
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	283,837,310	278,257,100	5,580,210	98.03	
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,773,050	27,474,200	1,298,850	95.49	Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan
	b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,880,000	10,080,000	800,000	92.65	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala selama 12 bulan
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244,184,260	240,702,900	3,481,360	98.57	Meningkatnya kinerja swakelola sebanyak 9 (sembilan) orang selama 12 bulan
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	40,292,000	40,210,000	82,000	99.80	
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40,292,000	40,210,000	82,000	99.80	Terpenuhinya jasa srvice, belanja penggantian suku cadang, pajak, BBM dan Pelumas kendaraan dinas selama 12 bulan
	<b>Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	50,000,000	49,606,000	394,000	99.21	
1	Pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	50,000,000	49,606,000	394,000	99.21	Terlaksananya Bimbingan teknis wawasan kebangsaan
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>					
1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.</i>	1,028,350,000	1,027,645,700	704,300	99.93	
	a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	1,028,350,000	1,027,645,700	704,300	99.93	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2022 sebanyak 10 Papol dan terealisasi sebanyak 8 Papol
	<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>					
1	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	16,517,750	16,197,500	320,250	98.06	
	a. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas asing di Daerah	16,517,750	16,197,500	320,250	98.06	Terdatanya keberadaan Ormas/LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	5,000,000	4,950,000	50,000	99.00	
1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	5,000,000	4,950,000	50,000	99.00	Terlaksananya peringatan hari HANI
	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>					
1	<i>Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	165,626,450	145,047,500	20,578,950	87.58	
	a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	34,157,500	33,247,500	910,000	97.34	Gangguan Konflik sosial yang dapat diredam selama 12 bulan
	b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	131,468,950	111,800,000	19,668,950	85.04	Terlaksananya FGD Forkopimda tahun 2022
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,440,219,064</b>	<b>2,397,609,521</b>	<b>42,609,543</b>	<b>98.25</b>	

---

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2022 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2022 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

### **4.2 LANGKAH KE DEPAN**

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum melalui pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat dengan Fasilitas Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

- 
2. Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat, melalui pelaksanaan program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika ,Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwaklan dan partai politik, pemilhan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
  3. Meningkatnya kesadaran parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi, melalui pelaksanaan program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta budaya politik dengan kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika ,Budaya Politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwaklan dan partai politik , pemilhan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
  4. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam, melalui pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pelaksanaan program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas.
  6. Menurunnya kasus narkoba di tengah masyarakat, melalui pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang

---

Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahnya dalam segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

**Parit Malintang, Maret 2023**

**KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



**JON EKA PUTRA, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19680113 198902 1 001**